

BAB I

PENDAHULUAN

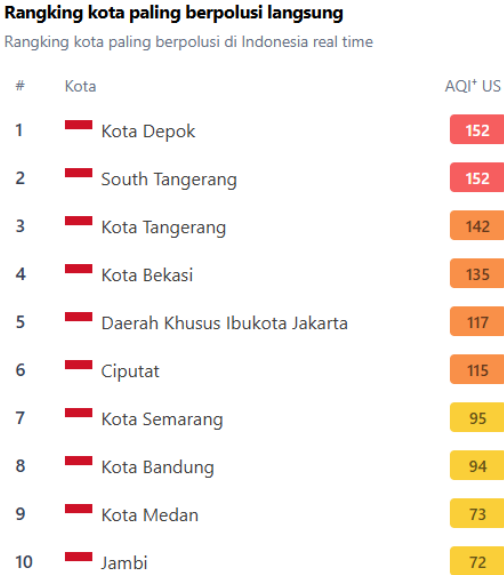
1.1 Latar Belakang

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan salah satu kota metropolitan terbesar dan terpadat di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 10 juta jiwa dan menempati wilayah seluas sekitar 662 km². Sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, pemerintahan, dan kebudayaan, Jakarta mengalami percepatan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta pertumbuhan kawasan industri menjadi bagian dari dinamika utama kota ini. Namun, di balik pesatnya pembangunan tersebut, muncul berbagai persoalan perkotaan yang kompleks dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, salah satunya ialah polusi udara. Berdasarkan data AirVisual tahun 2024, Jakarta kerap berada pada peringkat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan konsentrasi polutan terutama PM_{2.5} yang tercatat melampaui ambang batas aman menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Sumber pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun, disusul oleh praktik pembakaran sampah secara terbuka, serta aktivitas industri yang beroperasi di dalam maupun sekitar wilayah kota. Berbagai sumber pencemar ini berkontribusi pada penumpukan polutan berbahaya yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dampak kesehatan yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan karena kualitas udara yang buruk berkaitan dengan meningkatnya kasus gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, polusi udara juga dikenal sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular, stroke, hingga kanker paru-paru. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap udara yang tercemar dapat menurunkan kualitas hidup, mengurangi produktivitas, serta meningkatkan beban biaya kesehatan baik bagi individu maupun pemerintah.

Gambar 1.1 Ranking Kota Paling Berpolusi Langsung



Sumber: AirVisual, 2024.

Ruang terbuka hijau (RTH) hadir menjadi solusi yang sangat penting. RTH memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan, menghasilkan oksigen, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang dapat

meningkatkan kualitas hidup. Data dari Bappeda DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada 2020, luas RTH di Jakarta baru mencapai sekitar 9,98% dari total luas kota, jauh di bawah target minimal 30% yang disarankan untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bagian dari ruang publik. RTH dapat dipahami sebagai lahan tidak terbangun tanpa bangunan di atasnya yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk olahraga dan bermain, dengan karakter ruang yang terbuka secara visual dan berada di area luar ruangan. Konsep “terbuka” merujuk pada ruang yang dapat dimasuki atau digunakan secara bebas, tidak tertutup, tidak terhalang, tidak bersifat terlarang, serta dapat diakses oleh semua orang; sifatnya tidak mengikat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (Lynch, 1960).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi utama atau intrinsik yang berupa fungsi ekologis, serta fungsi tambahan atau ekstrinsik yang meliputi fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Bentuk RTH yang menjalankan fungsi ekologis antara lain sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai. Sementara itu, dalam fungsi tambahannya, RTH juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial sekaligus sarana rekreasi. Adapun bentuk RTH yang memiliki fungsi sosial budaya mencakup taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, serta taman pemakaman umum (TPU), termasuk Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Jakarta.

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak hanya berperan dalam membantu mengurangi polusi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan taman ini menunjukkan bahwa RTH dapat dioptimalkan tidak hanya untuk mendukung fungsi ekologis, tetapi juga untuk menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membaca, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas positif. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yang juga dikenal sebagai Taman Literasi Blok M, dirancang untuk menunjang kegiatan literasi dan pendidikan masyarakat. Pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya mengaktifkan kembali ruang hijau dan ruang publik di perkotaan, sekaligus mendukung program pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, yang menetapkan taman ini sebagai salah satu lokasi revitalisasi.

Taman tersebut diresmikan pada 18 September 2022 dan berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, RT 3/RW 1, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya antara lain paviliun literasi, selasar pandang, amphitheatre, taman plaza, taman bermain, *healing garden*, dan kolam teratai. Selain itu, kawasan taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, ruang baca, ruang diskusi, kedai kopi, mushala, toilet, dan ruang kerja.

Menurut Darmawan (dalam Anggit Pratomo dkk., 2019), ruang publik merupakan elemen perkotaan yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan kebudayaan bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan taman yang didukung oleh fasilitas utama seperti perpustakaan, amphitheater, dan ruang belajar. Keterlibatan seniman lokal dalam berbagai kegiatan kolaboratif turut menunjukkan bahwa aspek kebudayaan juga hidup dan berkembang di ruang ini. Respon positif dari mayoritas pengunjung terhadap Taman Literasi Blok M menggambarkan kualitas ruang publik yang baik dan sejalan dengan kriteria Carr (1992), yaitu mampu memenuhi kebutuhan, hak, dan makna bagi penggunanya. Dengan demikian, revitalisasi kawasan Blok M tidak hanya terjadi pada aspek fisik, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi. Dukungan infrastruktur transportasi, seperti MRT, turut meningkatkan aksesibilitas kawasan, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan keragaman aktivitas sosial.

Dampak tersebut ikut memperkuat posisi Taman Literasi Blok M sebagai ruang publik yang strategis. Data yang tersedia juga menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Taman Literasi Martha Christina Tiahahu tergolong tinggi dan cenderung meningkat, terutama pada akhir pekan, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap ruang publik yang berkualitas. Pada Desember 2022, taman mulai ramai dikunjungi dengan rata-rata 400–500 orang per hari pada hari kerja dan mencapai hingga 2.000 orang pada hari libur. Sejak diresmikan pada September 2022, jumlah kunjungan

sepanjang 2023 tercatat 306.211 orang, dan pada 2024 meningkat menjadi 342.809 orang.

Penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, merupakan bagian penting dari kebijakan penataan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan hukum dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, termasuk taman kota yang memiliki fungsi sosial, ekologis, dan edukatif. Salah satu taman yang dibangun berdasarkan kebijakan tersebut adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan dan berada di kawasan strategis Blok M sebagai pusat kegiatan masyarakat dan transportasi publik.

Secara hierarkis, pengembangan taman tersebut mengacu pada kebijakan penataan ruang perkotaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, yang menetapkan zonasi ruang terbuka hijau sebagai bagian dari sistem tata ruang kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kemudian dijabarkan dalam peraturan turunan yang lebih teknis, salah satunya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, yang mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH di Jakarta.

Selain mengacu pada regulasi ruang terbuka hijau, pembangunan Taman Literasi juga berkaitan erat dengan kebijakan pengembangan kawasan berbasis

transportasi atau *Transit Oriented Development* (TOD), mengingat lokasi taman berada di kawasan Blok M yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kawasan TOD di Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, yang memuat ketentuan mengenai prinsip pengembangan kawasan, pemanfaatan ruang, kelembagaan, serta mekanisme pengelolaan kawasan transit.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan penataan kawasan transit yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah kemudian menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019, yang memperbarui beberapa ketentuan terkait tata kelola, perizinan, dan pengembangan kawasan TOD agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan perkotaan. Perubahan ini juga mencabut beberapa panduan rancang kota sebelumnya dan menyisipkan pasal-pasal baru untuk memperkuat pengelolaan kawasan transit secara terpadu.

Dengan adanya regulasi tersebut, pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu tidak hanya dimaksudkan sebagai penyediaan ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan transit yang mengintegrasikan fungsi transportasi, ruang publik, dan aktivitas sosial budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa taman tersebut dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekologis kota, tetapi juga mendukung mobilitas perkotaan dan pengembangan literasi masyarakat.

Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi penunjukan dan pelaksanaan tugas organisasi pengelola yaitu PT Integrasi Transit Jakarta, dalam mengelola kawasan transit beserta ruang publik di dalamnya. Dengan demikian, pengelolaan Taman Literasi tidak terlepas dari kerangka hukum yang mengatur ruang terbuka hijau dan kawasan TOD secara terpadu, sehingga setiap kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan taman harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu termasuk dalam kategori RTH publik yang dikelola pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan umum. Pengelola taman ini adalah PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan taman yang diresmikan pada 18 September 2022 tersebut. Sebagai pengelola, PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) bertanggung jawab terhadap proses revitalisasi dengan tujuan menghadirkan ruang publik yang mendukung aktivitas literasi dan interaksi sosial di kawasan Blok M. Kontribusi PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) juga terlihat pada penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan literasi seperti ruang baca, amphitheater, dan area komunitas. Desain taman diarahkan untuk memadukan unsur alam dan ruang publik sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Di samping itu, PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) berupaya menghadirkan kegiatan tematik secara berkala untuk meningkatkan minat baca, terutama bagi anak-anak. Dengan demikian, PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan fisik taman, tetapi

juga berperan sebagai fasilitator kegiatan sosial dan literasi yang berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) turut mendukung visi DKI Jakarta sebagai “kota literasi” dan menyediakan ruang interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Revitalisasi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang diresmikan pada tahun 2022 berhasil meningkatkan daya tarik kawasan Blok M sebagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat. Taman yang dibangun di atas lahan sekitar 9.710 meter persegi ini kini dilengkapi berbagai fasilitas seperti amphitheater, plaza komunitas, ruang baca terbuka, serta perpustakaan yang dikelola sebagai bagian dari konsep taman berbasis literasi. Sejak dibuka kembali, taman ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi, terlihat dari ribuan ulasan pengunjung dan tingginya aktivitas masyarakat setiap harinya, terutama pada akhir pekan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi berhasil meningkatkan fungsi taman sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial masyarakat.

Namun demikian, tingginya jumlah pengunjung taman tidak sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas fasilitas literasi yang tersedia. Fasilitas Perpustakaan Taman Literasi yang berada di dalam kawasan taman memiliki ruang yang relatif terbatas, sehingga pada waktu-waktu tertentu, khususnya akhir pekan, pengunjung sering kesulitan mendapatkan tempat duduk bahkan harus menunggu karena kapasitas perpustakaan telah penuh. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pengunjung taman dengan daya tampung fasilitas literasi yang tersedia,

sehingga fungsi taman sebagai ruang publik berbasis literasi belum sepenuhnya optimal dalam praktiknya.

Gambar 1.2 Review Masyarakat terhadap Perpustakaan Taman Literasi

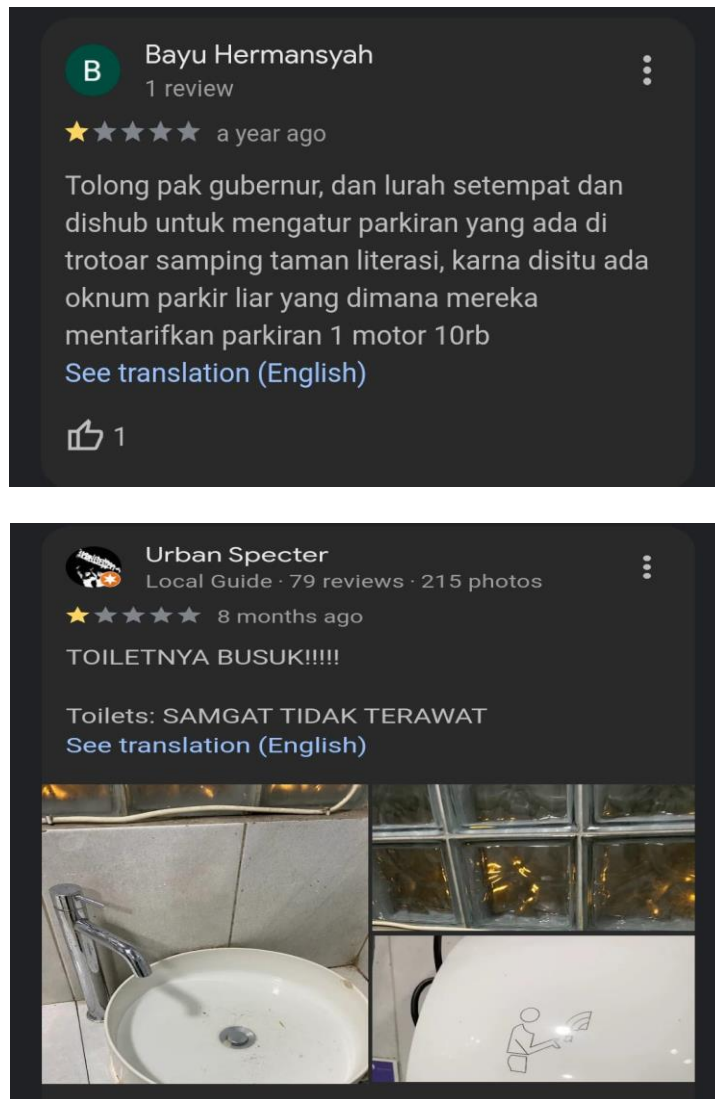


Sumber: Google Review, 2025.

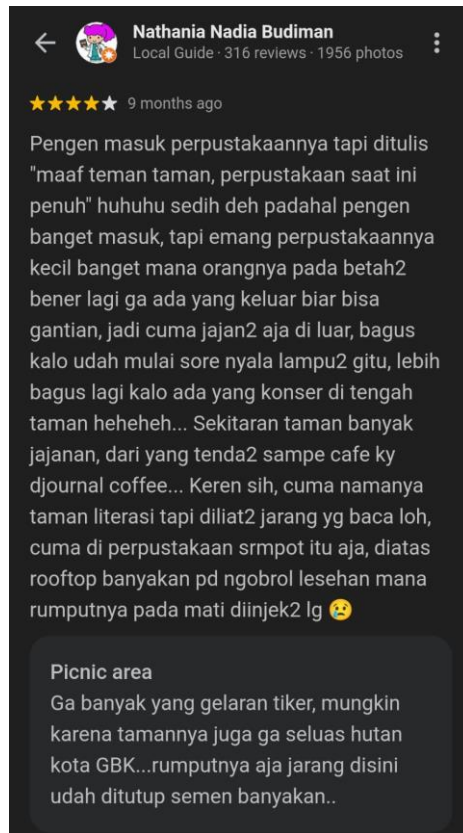
Di sisi lain, data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti potensi pemanfaatan ruang literasi publik sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, keberadaan taman literasi seharusnya mampu menjadi sarana efektif dalam meningkatkan budaya baca masyarakat perkotaan. Ketidaksesuaian antara tingginya minat baca masyarakat dengan keterbatasan kapasitas dan pengelolaan fasilitas literasi di taman ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan taman literasi masih memerlukan optimalisasi, khususnya dalam

perencanaan fasilitas, pengaturan pengunjung, serta penyelenggaraan program literasi yang berkelanjutan.

Gambar 1.3 *Review Masyarakat terhadap Fasilitas Taman Literasi*



Sumber: Google Review, 2024.



Sumber: Google Review, 2024.

Berdasarkan bukti masalah di atas, masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan belum baiknya peran PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). Beberapa masalah yang terjadi yaitu fasilitas toilet yang kotor dan tidak terawat, adanya pungli karena keterbatasan lahan parkir, serta kapasitas perpustakaan yang hanya dapat menampung maksimal 40 orang sekaligus dianggap kurang memadai untuk menampung pengunjung yang tinggi. Selain itu, koleksi buku yang tersedia masih

terbatas pada jenis tertentu dan tidak mencakup beragam tema, sehingga belum mampu menarik minat pengunjung dalam jumlah besar. Selain itu, program literasi yang diadakan belum berjalan secara konsisten dan kurang mendapatkan promosi yang maksimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang tersedia.

Dalam implementasinya, muncul berbagai permasalahan yang mencerminkan belum optimalnya peran PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ). Pertama, PT Integrasi Transit Jakarta memiliki kewenangan dalam operasional ruang, tetapi kebijakan konten, pemanfaatan fasilitas, dan penyelenggaraan kegiatan literasi belum memiliki standar operasional yang mengikat antar instansi. Hal ini terlihat dari adanya peristiwa viral pada tanggal 8 Januari 2025 di mana pengunjung diminta izin oleh seseorang yang mengatasnamakan Ormas Pemuda Pancasila sebelum membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Ini menunjukkan adanya klaim dari pihak tak resmi bahwa mereka punya otoritas, meskipun secara resmi pengelola menyatakan bahwa Taman Literasi adalah ruang publik dan tidak perlu izin dari Ormas.

Gambar 1.4 Berita Kasus Ormas di Blok M



Sumber: Antaranews.com, 2025.

Kedua, kurangnya informasi publik mengenai forum koordinasi rutin yang dilaksanakan menyebabkan tidak adanya evaluasi berkala terkait pengelolaan, pemeliharaan fasilitas, maupun efektivitas kegiatan literasi yang diselenggarakan. Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Meskipun data menunjukkan bahwa taman ini ramai dikunjungi yang tercatat lebih dari 230.000 pengunjung selama tahun 2023, tingginya kunjungan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan budaya baca atau partisipasi literasi warga. Belum adanya indikator keberhasilan yang disepakati bersama juga menjadi hambatan dalam mengukur dampak sosial taman tersebut. Tak hanya itu, keberadaan ruang komersial seperti tenant kafe dan area sewa turut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya komersialisasi ruang publik, yang justru menggeser fungsi literasi menjadi sekadar pelengkap estetika kota.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam pengelolaan Taman

Literasi Martha Christina Tiahahu di Jakarta. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan taman literasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam pemeliharaan taman masih belum baik dan perlu ditingkatkan agar fasilitas taman dapat berfungsi dengan baik serta memberikan kenyamanan maksimal bagi pengunjung, sehingga bisa menjawab pertanyaan penelitian tentang “Mengapa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu tidak terkelola dengan baik?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pelaksanaan peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di kawasan taman literasi
2. Masih terjadinya kerusakan fasilitas taman yang berulang, terutama pada fasilitas umum seperti toilet

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam mengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam mengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta
2. Menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam mengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi yang berjudul “*Peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam Pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan*” adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian pengelolaan fasilitas publik, tata kelola ruang publik, dan kolaborasi antara badan usaha dengan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori mengenai peran lembaga atau perusahaan dalam pengelolaan ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai media edukasi, interaksi sosial, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan taman literasi, integrasi

transportasi dengan ruang publik, serta model sinergi antaraktor dalam mewujudkan ruang publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti, skripsi ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis dan metodologis dalam meneliti dinamika keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang publik, sekaligus menambah wawasan tentang pengelolaan ruang publik.

2. Bagi para pemangku kepentingan

Bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan pengelola taman, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas peran masing-masing dalam mendukung keberlanjutan taman literasi, termasuk dalam hal perencanaan program, distribusi tanggung jawab, serta optimalisasi sumber daya.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum, terutama warga Jakarta Selatan, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga dan memanfaatkan taman literasi sebagai ruang pembelajaran dan interaksi sosial, sekaligus mendorong terciptanya ruang publik yang lebih inklusif, edukatif, dan berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Title	Background	Method	Result and Discussion	Conclusion
1.	PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGELOLAAN TWA GUNUNG TUNAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak, menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak, serta mengkaji pola kemitraan yang terbentuk. Melalui	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.	Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat enam aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan	Aktor-aktor yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak meliputi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan

		<p>pemahaman terhadap peran dan dinamika hubungan antar-stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi TWA Gunung Tunak.</p>		<p>Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Pemerintah Desa Mertak, serta Kelompok Tunak Besopoq. Berdasarkan hasil analisis, BKSDA NTB dan KIFC memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang sangat tinggi dalam pengelolaan, sedangkan Kelompok Tunak Besopoq berada pada kategori tinggi. Sementara itu, Dinas Pariwisata, Bappeda Lombok Tengah, dan Pemerintah Desa Mertak dinilai memiliki pengaruh serta kepentingan yang relatif rendah. Pola kemitraan yang ditemukan mencakup tiga prinsip utama, yaitu kesetaraan dan keseimbangan, transparansi, serta manfaat bersama. Prinsip-prinsip tersebut mendukung</p>	<p>Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Pemerintah Desa Mertak, serta Kelompok Tunak Besopoq. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain, sehingga secara bersama-sama mendukung pengelolaan kawasan TWA Gunung Tunak.</p>
--	--	--	--	---	--

				terlaksananya pengelolaan kolaboratif yang lebih efektif, dengan penekanan pada peningkatan sinergi antarpihak terkait untuk mencapai tujuan konservasi sekaligus pemberdayaan masyarakat.	
2.	EVALUASI TAMAN LITERASI MARTHA CHRISTINA TIAHAHU, BLOK M, JAKARTA SELATAN	Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi dan preferensi pengunjung terhadap jenis aktivitas serta fasilitas yang tersedia di taman. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengukuran menggunakan skala Likert dengan sejumlah indikator pertanyaan yang telah disusun.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas pengunjung menyatakan puas terhadap fasilitas yang tersedia di taman. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan dan potensi taman dapat dioptimalkan secara lebih maksimal.	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas pengunjung menyatakan puas terhadap fasilitas yang tersedia di taman. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan dan potensi taman dapat dioptimalkan secara lebih maksimal.
3.	ANALISIS PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI HUTAN KOTA BEKASI	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota Bekasi. Pengelolaan	Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sementara itu,	Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kerja sama dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan	Rekomendasi yang dapat diajukan adalah agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam

		<p>yang efektif memerlukan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan serta peran yang beragam.</p>	<p>penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> untuk memilih pihak-pihak yang dapat memberikan data primer maupun data sekunder.</p>	<p>efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun, pada Dinas Lingkungan Hidup masih terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Salah satu kendala tersebut terlihat pada tahap analisis komunikasi antarpemangku kepentingan yang masih belum berjalan secara maksimal akibat adanya SOP yang berbeda pada masing-masing instansi. Selain itu, pengelolaan Hutan Kota Bekasi juga belum terlaksana secara optimal karena belum terbangunnya komunikasi yang baik serta belum adanya kerja sama dengan pihak di luar pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan Hutan Kota Bekasi belum mampu memberikan</p>	<p>pengelolaan Hutan Kota serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak di luar pemerintahan daerah.</p>
--	--	--	---	---	---

				manfaat yang besar bagi masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut.	
4.	ANALISIS KESIAPAN TAMAN LITERASI MARTA CHRISTINA TIAHAHU (TAMAN LITERASI BLOK M) SEBAGAI OBJEK WISATA BARU DI JAKARTA	Penelitian ini membahas kesiapan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu sebagai objek wisata baru di Jakarta. Ruang publik yang berada di ibu kota ini memiliki desain arsitektur yang estetik, sehingga berpotensi dijadikan sebagai lokasi berfoto yang menarik dan dinilai mampu berkembang menjadi salah satu destinasi wisata perkotaan yang baru. Namun demikian, untuk menjadikannya sebagai tujuan wisata, fasilitas yang tersedia tetap perlu dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah taman ini telah siap dijadikan objek wisata baru atau masih memerlukan penambahan sarana dan prasarana agar dapat	Penelitian ini dirancang dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang ada. Pengambilan data berupa kajian pustaka dan observasi langsung untuk melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Taman Literasi Blok M.	Berdasarkan perkembangan dan kondisi di lapangan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai taman semata, tetapi juga telah berkembang sebagai tujuan wisata yang memiliki fungsi rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial. Sebagai salah satu indikator perkembangan pariwisata, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Taman Literasi Martha Christina Tiahahu sebagai objek wisata baru telah mencapai 80%. Fasilitas tersebut meliputi objek wisata, aksesibilitas, akomodasi, fasilitas pendukung, transportasi, <i>catering service</i> , aktivitas rekreasi, komunikasi, area	Sarana objek wisata harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengunjung atau wisatawan harus disesuaikan dengan kebutuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana kuantitatif mengarah pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan di satu objek wisata, sedangkan kualitatif mengarah pada mutu pelayanan agar menghasilkan kepuasan pengunjung atau wisatawan.

		meningkatkan daya tarik pengunjung.		perbelanjaan, keamanan, kebersihan, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Sementara itu, fasilitas yang masih belum tersedia adalah sistem perbankan dan sarana pendidikan. Meskipun demikian, dengan tingkat kesiapan yang ada, Taman Literasi ini dinilai sudah cukup layak untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata baru bagi masyarakat.	
5.	PEMETAAN PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN REMBANG	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dan menganalisis peran mereka dalam mengelola Taman Wisata Pantai Kartini.	Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 27 pemangku kepentingan yang terlibat, yang diklasifikasikan ke dalam peran sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Pemetaan pemangku kepentingan menggunakan model konsep pentahelix, yang meliputi pemerintah,	Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis peran <i>stakeholder</i> , menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> yang berperan sesuai klasifikasi: primer, sekunder,

				media, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.	dan kunci.
6.	POLA PENGGUNAAN RUANG-RUANG INTERAKSI DI PUSAT KOMUNITAS TAMAN LITERASI BLOK M	Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh pengunjung dalam penggunaan ruang publik di Taman Literasi Blok M.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan melalui kegiatan observasi di Taman Literasi, baik pada hari kerja maupun hari libur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruang yang dimanfaatkan sebagai lokasi aktivitas pengunjung di Taman Literasi, antara lain plaza sebagai area duduk pengunjung, ruang bermain anak, ruang pertunjukan, ruang tenant, taman atap, dan area tangga. Masing-masing ruang tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam menggunakannya.	Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pola pemanfaatan ruang interaksi di Taman Literasi Blok M masih belum sepenuhnya optimal, meskipun taman tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menarik serta didukung oleh aksesibilitas yang baik.
7.	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Taman Bungkul Surabaya	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kolaborasi para stakeholder yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul, Surabaya.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kolaborasi para stakeholder yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan telah berjalan dengan baik, tetapi pelaksanaannya secara keseluruhan masih belum optimal.	Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta model kolaborasi para stakeholder di Taman Bungkul Surabaya, berdasarkan delapan indikator kolaborasi yang

			Taman Bungkul Surabaya.		digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antarpemangku kepentingan di Taman Bungkul Surabaya masih sangat minim.
8.	HARMONISASI RUANG PUBLIK JAKARTA: PERAN MRT DALAM MENDORONG KUNJUNGAN KE TAMAN LITERASI BLOK M	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran ITJ (Integrasi Transit Jakarta), khususnya MRT, sebagai faktor pendorong bagi masyarakat untuk mengunjungi Taman Literasi Blok M serta untuk melihat Taman Literasi Blok M sebagai salah satu ruang publik.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan wawancara tidak terstruktur. Data penelitian diperoleh dari informan yang memenuhi kriteria, yaitu pengunjung Taman Literasi Blok M yang memanfaatkan transportasi MRT, serta didukung oleh data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Literasi Blok M telah berhasil berfungsi sebagai ruang publik yang memenuhi unsur kenyamanan (<i>comfort</i>), relaksasi (<i>relaxation</i>), keterlibatan (<i>engagement</i>), dan penemuan (<i>discovery</i>). Selain itu, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan MRT juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat individu maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi pariwisata yang terintegrasi secara baik.	Penelitian yang menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam ini menunjukkan bahwa tanggapan pengunjung terhadap unsur kenyamanan, relaksasi, keterlibatan, dan penjelajahan tergolong sangat positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Taman Literasi Blok M tidak hanya berhasil dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu menghadirkan ruang sosial yang inklusif serta mendukung terjadinya interaksi lintas budaya dan antargenerasi.

			sekunder yang bersumber dari media massa maupun internet.		
9.	PEMETAAN PERAN SERTA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN RTH PUBLIK DI KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN <i>STAKEHOLDER ANALYSIS</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memetakan keterlibatan para stakeholder dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram.	Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak secara deskriptif dengan melibatkan responden yang dipilih melalui teknik <i>snowball sampling</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, dan PUPR Kota Mataram berada pada Kuadran I sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram. Selanjutnya, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, BKD, dan Balitbang Kota Mataram termasuk dalam Kuadran II. Pada Kuadran III terdapat pengelola lokasi, yaitu Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, sedangkan masyarakat Kota Mataram berada pada Kuadran IV. Belum tercapainya target minimal RTH Publik Kota	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stakeholders yang berperan dan terlibat dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram terbagi ke dalam empat kuadran. Kuadran I mencakup DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, dan PUPR Kota Mataram. Kuadran II meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, BKD, serta Balitbang Kota Mataram. Kuadran III terdiri atas pengelola lokasi, yaitu Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq. Sementara itu, Kuadran

				Mataram disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antarstakeholder, serta terbatasnya pendanaan untuk pembebasan lahan dan pengembangan potensi RTH publik di Kota Mataram.	IV meliputi masyarakat Kota Mataram.
10.	PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN DI TAMAN LITERASI MARTHA CHRISTINA TIAHAHU	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh <i>experiential marketing</i> terhadap kepuasan wisatawan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wisatawan yang berkunjung ke Taman Literasi Martha Christina Tiahahu selama periode November 2022 hingga Maret 2023, dengan jumlah keseluruhan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>experiential marketing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mampu menghadirkan pengalaman yang dirasakan pengunjung melalui pancaindra, didukung oleh kualitas pelayanan dari pengelola serta berbagai kegiatan edukatif yang menarik. Kondisi tersebut mendorong terciptanya kepuasan wisatawan karena memberikan pengalaman yang	Pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai kegiatan yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan pengunjung, misalnya melalui penyelenggaraan pertunjukan teater interaktif yang memungkinkan wisatawan ikut berpartisipasi dalam alur cerita, seperti pada konsep teater wisata monolog.

			sebanyak 140.646 orang.	bermakna dan meninggalkan kesan yang mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu telah berhasil menciptakan lingkungan yang menarik, interaktif, dan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat.	
--	--	--	-------------------------	--	--

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran organisasi telah diterapkan dalam pengelolaan taman pada berbagai pemerintah daerah maupun pihak swasta di Indonesia. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan taman memerlukan keterlibatan pemerintah atau pemangku kepentingan yang berperan dalam setiap kegiatan pengelolaannya.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yang berjudul “Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan”, terletak pada lokasi penelitian. Berdasarkan tabel penelitian terdahulu tersebut, meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai peran stakeholders dalam pengelolaan taman, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis “Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan”, terutama di wilayah Jakarta Selatan.

Pemilihan PT Integrasi Transit Jakarta sebagai satu-satunya objek kajian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan pihak yang secara langsung diberi mandat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*), termasuk Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Dengan demikian, PT Integrasi Transit Jakarta memiliki kewenangan operasional, tanggung jawab manajerial, serta peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan taman. Hal ini

menjadikan PT Integrasi Transit Jakarta sebagai aktor paling relevan untuk dianalisis dalam melihat efektivitas pengelolaan taman dari perspektif peran organisasi.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni *ad* dan *ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam perkembangannya, akar kata tersebut melahirkan bentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *administration*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai administrasi (Hadari, 1994: 23). Luther Gulick menyatakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*”, yang menunjukkan bahwa administrasi berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis memandang administrasi publik sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan politik.

Administrasi publik juga dapat dipahami sebagai upaya koordinasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam arti yang lebih luas, administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, disertai kemampuan dan teknik tertentu yang berfungsi mengarahkan serta memberi tujuan pada aktivitas sekelompok orang.

Prajudi Atmosudirdjo menegaskan bahwa administrasi publik merupakan administrasi negara sebagai sebuah organisasi sekaligus sebagai aktivitas administrasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan negara. Dwight Waldo mendefinisikan administrasi publik sebagai proses manajemen dan pengorganisasian sumber daya manusia beserta perangkat pendukung lainnya guna mencapai tujuan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai salah satu cabang ilmu administrasi yang memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

White (dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik meliputi seluruh kegiatan negara yang diarahkan untuk melaksanakan kebijakan negara. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kasim (1994: 8) menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya berperan dalam tahap perumusan kebijakan, tetapi juga dalam tahap implementasi, karena administrasi publik berfungsi menunjang tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan politik. Selain itu, administrasi publik juga dipahami sebagai organisasi dan proses administrasi dari unit-unit yang berupaya mencapai tujuan negara. Tujuan tersebut mencakup usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik dan pelayanan publik (Kristiadi, 1994: 23).

Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) memandang administrasi publik sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Dimock (1996: 40) juga menegaskan bahwa proses administrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses politik suatu bangsa. Pandangan ini dapat dijelaskan melalui perkembangan paradigma administrasi, di mana administrasi

publik berakar dari ilmu politik dengan tujuan agar penyelenggaraan aktivitas kenegaraan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Suradinata, 1993: 33).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan negara serta segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti organisasi publik, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Tujuan utama administrasi publik adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui kinerja aparatur yang efektif dalam lingkungan kerja.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik mengalami perkembangan seiring terjadinya pergeseran paradigma secara berkelanjutan. Administrasi publik bersifat dinamis sehingga memunculkan beragam batasan dan definisi. Dalam berbagai literatur administrasi publik, terdapat sejumlah konsepsi, teori, dan fenomena yang saling berhubungan serta saling bersinggungan; kondisi ini merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Kumpulan konsepsi tersebut umumnya disebut sebagai paradigma. Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) mengemukakan enam paradigma administrasi publik, yaitu sebagai berikut.

1. Paradigma Pertama: Dikotomi Politik–Administrasi (1900–1926).

Pada periode ini, terdapat pemisahan yang tegas antara kajian ilmu politik dan

administrasi. Frank J. Goodnow (1900) menyatakan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi berbeda: (1) fungsi politik yang berkaitan dengan perumusan kebijakan; dan (2) fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Leonard D. White (1926) juga menekankan bahwa administrasi seharusnya tidak dipengaruhi unsur politik. Administrasi negara dipandang sebagai bidang kajian yang berlandaskan ilmu pengetahuan, bersifat netral, serta berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Paradigma ini pada akhirnya menempatkan administrasi negara sebagai lokus yang bebas nilai.

2. Paradigma Kedua: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927–1937).

Pada tahap ini berkembang pandangan bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal. Fokus utama paradigma kedua adalah cara menerapkan asas-asas administrasi tersebut dalam praktik penyelenggaraan administrasi negara.

3. Paradigma Ketiga: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970).

Pada periode ini muncul pemikiran bahwa administrasi negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu politik. Administrasi negara dan politik saling memengaruhi serta saling memberi masukan. Ilmu politik dipahami memiliki empat komponen, yaitu teori politik, lembaga politik, kekuatan politik, dan politik internasional; sedangkan administrasi negara ditempatkan sebagai bagian dari lembaga politik.

4. Paradigma Keempat: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970).

Pada masa ini, para ahli administrasi merasa posisinya terpinggirkan oleh

disiplin lain, khususnya karena administrasi dianggap berada pada posisi lebih rendah dalam ilmu politik. Oleh sebab itu, para tokoh administrasi publik mulai menegaskan administrasi sebagai ilmu tersendiri. Ilmu administrasi kemudian dipahami sebagai studi yang mencakup teori organisasi dan manajemen.

5. Paradigma Kelima: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–sekarang).

Paradigma kelima berfokus pada teori perilaku lembaga dan cara pencapaiannya, sedangkan lokusnya menitikberatkan pada kebijakan publik atau ilmu kebijakan. Pada tahap ini, para ahli administrasi publik semakin terlibat dalam pengembangan ilmu kebijakan, ekonomi politik, serta proses pembuatan dan evaluasi keputusan.

6. Paradigma Keenam: *Governance* (1990–sekarang).

Governance dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai kesejahteraan warga. Paradigma ini menekankan proses yang kompleks, di mana sektor masyarakat memiliki peran penting dalam menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada interaksi individu, kelembagaan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Ikeanyibe dalam Astuti dkk. (2020) menjelaskan bahwa konsep *governance* digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan modern, yang membedakannya dari pola “*government*” tradisional. Dalam paradigma ini, proses politik bersifat lebih luas dan

partisipasi warga maupun kelompok masyarakat menjadi unsur penting dalam kebijakan serta program pemerintah.

Berdasarkan enam paradigma administrasi publik, penelitian ini berada dalam paradigma keenam, yaitu *Governance*. Hal ini disebabkan karena sejalan dengan penelitian ini yang membahas mengenai peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan serta fokus utama penelitian ini adalah pada peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam proses pengelolaan taman literasi, yang mencerminkan keterlibatan sektor pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Paradigma *governance* menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan aktor-aktor lain dalam masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pengelolaan taman literasi sebagai ruang publik tidak lagi hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan tata kelola yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini sesuai dengan semangat paradigma *governance* yang mengedepankan partisipasi, jaringan kerja sama, dan transparansi dalam praktik administrasi publik modern.

1.6.2.3 Manajemen Publik

Manajemen publik memiliki kedudukan yang penting dalam kajian administrasi publik. Secara analogi, kebijakan publik dapat dipahami sebagai sistem otak dan saraf, sedangkan manajemen publik berperan layaknya jantung dan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Keduanya saling berkaitan dan memengaruhi

satu sama lain (Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Keban, 2014). Oleh sebab itu, manajemen publik dapat dimaknai sebagai proses untuk menggerakkan berbagai sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, agar arahan yang ditetapkan dalam kebijakan publik dapat dijalankan.

Manajemen publik sering pula dipahami sebagai manajemen yang dijalankan dalam lembaga pemerintahan karena berkaitan dengan batasan serta ruang lingkup pengelolaan urusan pemerintahan. Overman dalam Keban (2014) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan kajian yang bersifat lintas disiplin dan membahas berbagai aspek umum dalam organisasi, yaitu perpaduan antara fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya, meliputi sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan unsur politik. Di sisi lain, Sahya Anggara dalam Prastiyanto dkk. (2021) menyatakan bahwa manajemen publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan publik melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.6.2.4 Peran

Peran dapat dimaknai sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu peristiwa tertentu (Poerwodarminta dalam Anggraini dkk., 2024). Dalam konteks kehidupan sosial, peran merujuk pada perilaku yang diharapkan melekat pada individu yang memiliki kedudukan tertentu di

masyarakat. Biddle dan Thomas dalam Anggraini dkk. (2024) menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat rumusan yang mengatur harapan perilaku terhadap individu yang menempati posisi tertentu. Sementara itu, Suhardono memaknai peran sebagai seperangkat pedoman yang membatasi sekaligus mengarahkan perilaku yang seharusnya dijalankan oleh seseorang sesuai posisinya (Hia, 2019).

Soerjono Soekanto (2002) mendefinisikan peran sebagai sisi dinamis dari kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan sedang menjalankan peranan. Setiap individu pada dasarnya memiliki beragam tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tempat ia berada. Lebih lanjut, Soekanto membagi peran ke dalam tiga bentuk kedudukan, yaitu (Lantaeda dkk., 2017):

1. Peran aktif merupakan peran yang timbul karena posisi seseorang dalam kegiatan kelompok, seperti sebagai pengurus, pejabat, atau jabatan lainnya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada seseorang atas kontribusi atau sumbangan yang bermanfaat bagi kelompok.
3. Peran pasif merupakan sebutan bagi anggota kelompok yang cenderung kurang aktif dan memilih menahan diri agar fungsi-fungsi lain dalam kelompok tetap dapat berjalan, sehingga kelompok dapat berfungsi secara baik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah langkah yang mengatur individu atau entitas organisasi dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan

tujuan dan persyaratan yang telah disetujui bersama, agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal.

1.6.2.5 Peran Organisasi

Peran dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menjalankan suatu aktivitas. Menurut Poerwadarminta, tindakan tersebut berkaitan dengan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi atau kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Dalam KBBI, peran diartikan sebagai seperangkat harapan yang melekat pada seseorang yang menempati kedudukan tertentu dalam suatu kelompok (Poerwadarminta, 1995:95).

Dalam konteks pemerintahan, peranan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat luas, mulai dari memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga menjalankan fungsi yang bersifat ideologis dan spiritual. Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa terdapat tiga peran pokok pemerintah, yaitu peran dalam melayani masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan. Ketiga peran tersebut saling berkaitan, di mana pelayanan kepada masyarakat bertujuan mewujudkan keadilan, pemberdayaan diarahkan untuk menciptakan kemandirian, sedangkan pembangunan ditujukan untuk menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat (Ndraha, 1987:110).

Menurut Syarfi (2022), peran dapat dikaji melalui empat fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Keempat fungsi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan, yakni pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat, sehingga kebutuhan dasar maupun layanan administratif dapat terpenuhi secara baik.
2. Fungsi Pengaturan (Regulasi), yaitu pemerintah berwenang menyusun serta menegakkan peraturan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, sekaligus mencegah terjadinya monopoli maupun kegagalan pasar.
3. Fungsi Pemberdayaan, yaitu pemerintah menjalankan peran untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, misalnya melalui pelatihan atau dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
4. Fungsi Pembangunan, yaitu pemerintah berperan sebagai penggerak pembangunan melalui perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur serta kegiatan ekonomi guna mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

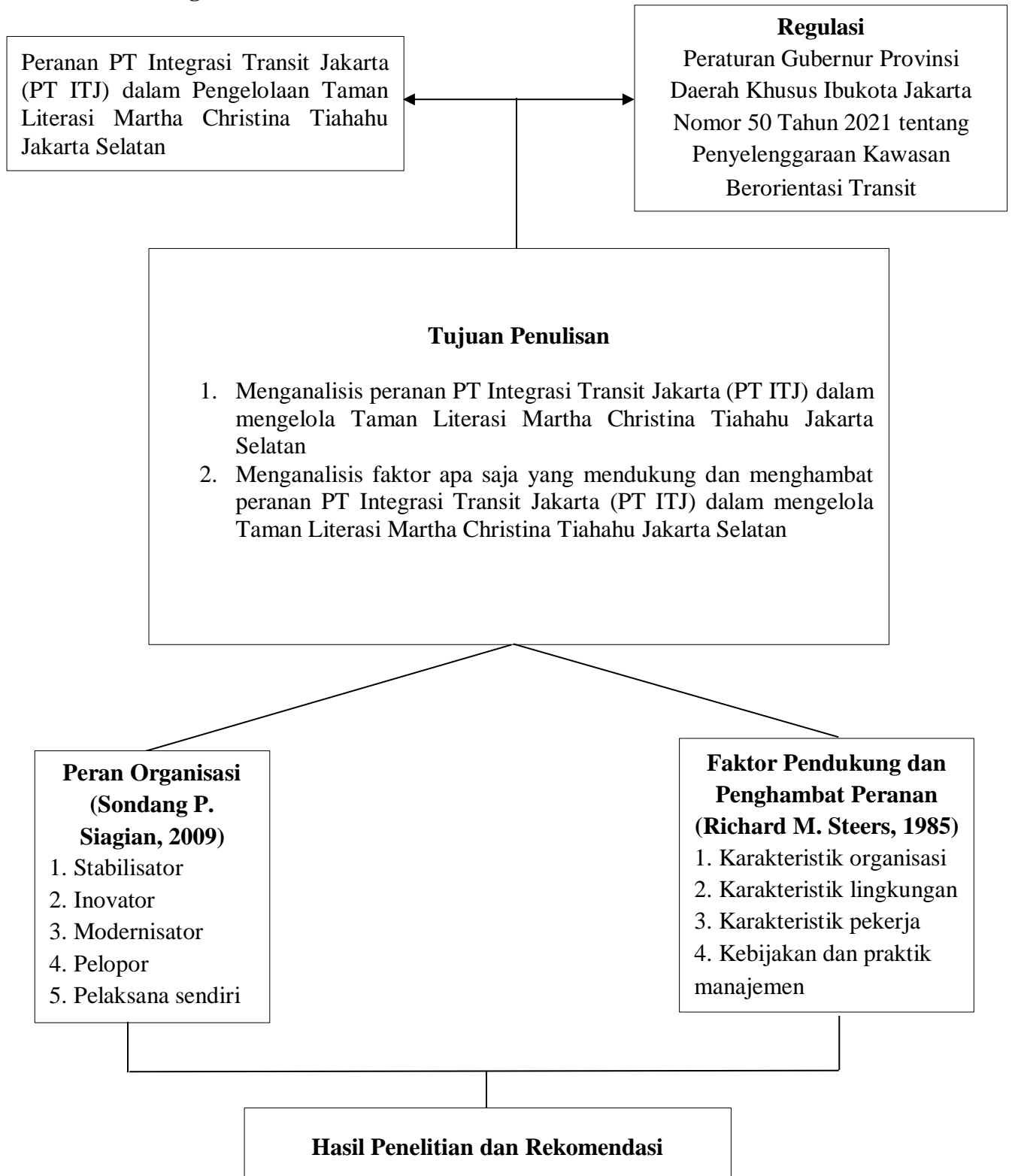
1.6.2.6 Tata Kelola Ruang Publik

Tata kelola ruang publik menjelaskan cara mengelola ruang-ruang bersama seperti taman kota, trotoar, plaza, dan ruang terbuka hijau agar dapat berfungsi secara optimal sebagai wadah interaksi sosial, mendorong inklusi masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Menurut Matthew Carmona

(2010), tata kelola ruang publik mencakup tiga komponen utama, yaitu desain, manajemen fisik, dan manajemen sosial. Desain berperan dalam membentuk struktur ruang serta menentukan tingkat aksesibilitas, sedangkan manajemen fisik berkaitan dengan pemeliharaan dan keamanan. Adapun manajemen sosial menekankan pengaturan pemanfaatan ruang dan keterlibatan warga dalam penggunaannya. Jan Gehl (2011) menegaskan bahwa ruang publik seharusnya menunjang kehidupan sosial sehari-hari melalui lingkungan yang nyaman, aman, dan manusiawi, sehingga penataan ruang publik tidak hanya berorientasi pada keindahan fisik semata. Sementara itu, UN-Habitat (2015) memandang ruang publik sebagai unsur penting dalam tata kota yang inklusif dan berkeadilan, dengan menekankan prinsip partisipasi, akses untuk semua, keberlanjutan, transparansi, serta keadilan sosial.

Jacobs dan Appleyard (1987) memandang ruang publik sebagai simbol demokrasi dan pluralisme, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkannya. Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, serta perlunya ruang publik yang mampu mengakomodasi beragam aktivitas sosial. Secara keseluruhan, berbagai pandangan tersebut menegaskan bahwa tata kelola ruang publik yang baik perlu bersifat kolaboratif dan partisipatif, sekaligus mampu menjawab kebutuhan sosial maupun kultural masyarakat.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Operasionalisasi Konsep

Analisis peranan adalah usaha untuk memahami mengenai PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) yang ikut andil dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan serta memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

1.8.1 Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi

Peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan kewajiban dan hak yang dimiliki pengelola dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan penggerakan aktivitas taman agar sesuai tujuan ruang publik literasi. Dalam penelitian ini, peranan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dianalisis berdasarkan Teori Peran Organisasi (Sondang P. Siagian, 2009) yang terdiri dari 5 peran, yaitu:

1. Stabilisator, yaitu PT ITJ berperan menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan lingkungan taman agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman. Peran ini terlihat dari pengaturan penggunaan fasilitas, pengawasan aktivitas pengunjung, serta penerapan aturan dan tata tertib taman.
2. Inovator, yaitu PT ITJ berperan dalam mengembangkan ide, konsep, dan program baru yang mendukung fungsi taman sebagai ruang publik berbasis literasi. Peran ini tercermin dari upaya menghadirkan kegiatan literasi, kerja

sama dengan komunitas, serta pengembangan konsep taman yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi tetapi juga sebagai ruang edukasi.

3. Modernisator, yaitu PT ITJ berperan mendorong penerapan sistem pengelolaan yang modern dan profesional dalam pengelolaan taman. Hal ini meliputi penataan fasilitas yang mengikuti standar ruang publik modern, pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi, serta integrasi taman dengan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) Blok M.
4. Pelopor, yaitu PT ITJ berperan sebagai penggerak dan contoh dalam pengelolaan taman tematik berbasis literasi di Jakarta. Peran ini diwujudkan melalui inisiatif penyelenggaraan kegiatan, pengembangan konsep taman literasi, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat dan komunitas dalam memanfaatkan taman secara edukatif.
5. Pelaksana sendiri, yaitu PT ITJ berperan melaksanakan secara langsung kegiatan operasional pengelolaan taman, termasuk pemeliharaan fasilitas, pengaturan penggunaan ruang, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan taman, terutama pada aspek yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pihak lain.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi

Dalam penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran PT Integrasi Transit Jakarta dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi

menurut Richard M. Steers (1985). Steers menyatakan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, serta kebijakan dan praktik manajemen.

1. Karakteristik organisasi, yaitu dilihat dari kejelasan struktur, pembagian tugas, serta koordinasi antara PT ITJ dan instansi terkait dalam pengelolaan taman.
2. Karakteristik lingkungan, yaitu dilihat dari dukungan regulasi pemerintah, kondisi sosial masyarakat, serta partisipasi komunitas dalam memanfaatkan taman literasi.
3. Karakteristik pekerja, yaitu dianalisis melalui kompetensi, kemampuan, dan motivasi petugas dalam melaksanakan pengelolaan taman.
4. Kebijakan dan praktik manajemen, yaitu dianalisis melalui perencanaan program, sistem pengawasan, serta mekanisme evaluasi yang diterapkan dalam pengelolaan taman literasi.

1.9 Fenomena Penelitian

Tabel 1.2

Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi	a. Stabilisator	- PT ITJ menetapkan aturan penggunaan fasilitas dan tata tertib taman - Tersedia petugas keamanan dan pengawasan aktivitas pengunjung
		b. Inovator	- PT ITJ menghadirkan konsep taman literasi yang terintegrasi dengan kawasan TOD Blok M - Terdapat penyelenggaraan kegiatan literasi seperti diskusi dan kegiatan komunitas
		c. Modernisator	- Fasilitas taman ditata dengan konsep ruang publik modern dan ramah pejalan kaki - Informasi kegiatan disampaikan melalui media digital dan platform daring
		d. Pelopor	- PT ITJ menjadi salah satu pengelola yang mengembangkan taman tematik berbasis literasi di Jakarta - PT ITJ mendorong keterlibatan komunitas dalam penggunaan taman sebagai ruang edukasi
		e. Pelaksana Sendiri	- PT ITJ terlibat langsung dalam pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan operasional harian taman - PT ITJ juga berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan PT Integrasi Transit Jakarta	a. Karakteristik Organisasi	- Terdapat pembagian tugas internal di PT ITJ - Struktur organisasi pengelolaan taman sudah ditetapkan
		b. Karakteristik Lingkungan	- Lokasi taman berada di kawasan strategis Blok M yang mudah diakses transportasi umum - Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik

		c. Karakteristik Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas taman bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan pelayanan pengunjung - Terdapat tenaga pengelola yang membantu penyelenggaraan kegiatan di taman
		d. Kebijakan dan Praktik Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan taman mengacu pada kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menghimpun informasi dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam penelitian, lalu mengajukan pertanyaan, menelusuri data yang bersifat khusus, menganalisisnya secara induktif, dan menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan (Creswell, 2014:4). Menurut Pasolong (2013:5), penelitian kualitatif terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu deskriptif, eksplanatori, dan eksploratif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

1.10.2 Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian menjadi hal penting dalam menentukan tujuan dan objek penelitian, karena dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti memilih Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, sebagai lokasi penelitian.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yang juga dikenal sebagai narasumber, adalah individu atau kelompok yang dijadikan sampel dalam suatu penelitian. Informan merupakan pihak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti. Keberadaan informan sangat penting karena dapat membantu peneliti memperoleh informasi secara tepat dan efisien (Moleong, 2021). Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri atas individu atau kelompok yang memiliki informasi yang akurat dan dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian sering pula disebut sebagai narasumber, yaitu pihak yang memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian juga dikenal dengan istilah informan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja, dengan PT Integrasi Transit Jakarta sebagai subjek penelitian.

1.10.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan data yang bersifat kualitatif, yaitu data berupa rangkaian kata, frasa, atau kalimat yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan fenomena yang ditemukan selama penelitian, bukan data dalam bentuk angka. Menurut Lofland dan Lofland (2009:137), sumber data kualitatif meliputi kata-kata, dokumen, serta berbagai informasi lain yang relevan. Selain itu, data kualitatif juga dapat berbentuk kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data kualitatif dapat dipahami sebagai data yang disajikan secara verbal atau naratif, bukan secara numerik. Data tersebut juga dapat diartikan sebagai susunan kata, frasa, atau pernyataan yang mampu menggambarkan fenomena maupun kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, meliputi informasi, keterangan, dan tanggapan yang diberikan oleh informan melalui wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut dapat berasal dari dokumen, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.10.5 Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus memiliki sumber data yang jelas dan konkret agar keabsahan serta kebenaran data dan informasi yang diperoleh dapat terjamin. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47), sumber data utama dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, berasal dari kata-kata dan tindakan. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan data tambahan yang diperoleh dari dokumen maupun foto. Sumber data merujuk pada subjek yang memiliki bukti berupa data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau dari akar permasalahan yang diteliti. Data ini dapat dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki informasi mengenai Peranan PT Integrasi Transit Jakarta dalam Pengelolaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari PT Integrasi Transit Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh peneliti melalui berbagai dokumen dan arsip disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari kajian pustaka, dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal. Adapun

beberapa bentuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M dan Sisingamangaraja
2. Artikel jurnal dan berita lain yang terkait serta sesuai dengan topik penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Peneliti menyusun pertanyaan secara sistematis dan menyampaikannya kepada narasumber dalam susunan yang teratur. Pendekatan ini membuat proses pengumpulan data berlangsung secara tertib dan menyeluruh, sehingga memudahkan peneliti dalam menelusuri serta menganalisis data yang diperoleh.

b. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah kondisi terbaru Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di pengelolaan Taman Literasi guna melihat bagaimana keadaan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian, data penunjang yang berbentuk arsip maupun dokumen merupakan unsur penting yang perlu dikaji secara mendalam. Keberadaan foto-foto dan karya tulis ilmiah dapat menjadi bukti pendukung yang memperkuat hasil wawancara.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif yang mencakup studi pustaka serta proses transkripsi hasil wawancara. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi dan mencatat informasi yang relevan secara lebih rinci dan teliti dari sejumlah data yang terkumpul. Pada tahap ini, data dirangkum dengan memilih poin-poin utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya disusun dalam bentuk uraian singkat, dapat pula berupa bagan, pemetaan hubungan antar kategori,

maupun bentuk penyajian lain yang memudahkan peneliti memahami informasi yang telah direduksi.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dihasilkan dalam proses analisis masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan apabila pada tahap selanjutnya ditemukan data tambahan. Kesimpulan tersebut akan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya apabila didukung oleh bukti yang konsisten, khususnya melalui proses pengecekan ulang ke lapangan saat pengumpulan data berlangsung. Jika sejak tahap awal kesimpulan sudah ditopang oleh bukti yang konsisten, maka kesimpulan itu dapat dinilai memiliki kredibilitas.

Selanjutnya, interpretasi data dalam penelitian dilakukan melalui upaya menggali makna, memahami konteks, serta menerapkan teori yang relevan untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses interpretasi ini membantu peneliti menemukan pola umum, melihat persamaan maupun perbedaan data, serta menyusun argumen yang didukung oleh temuan, sehingga mempermudah penyusunan kesimpulan penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Triangulasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat keabsahan data hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bentuk triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yang dilakukan dengan

membandingkan informasi atau data melalui pengumpulan data menggunakan subjek atau metode yang berbeda untuk membandingkan kesamaan atau perbedaannya. Dengan demikian, dapat diketahui kredibilitas data yang diperoleh melalui perbandingan tersebut. Dalam hal ini, peneliti mencari sumber yang berbeda untuk melihat fenomena dari perspektif yang berbeda untuk memverifikasi keabsahannya.